

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan merupakan unit pelayanan teknis Kementerian Agama Kabupaten Pesawaran yang memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat. Dengan adanya perkembangan teknologi informasi yang saat ini semakin pesat dituntut untuk memberikan pelayanan yang baik serta transparan dalam pengelolaan informasi baik informasi pelayanan publik maupun informasi keuangan. Laporan keuangan yang baik bisa dilihat dari ketepatan penggunaan akun sesuai dengan kebutuhannya sehingga mampu mempengaruhi peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Dalam pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat, KUA kecamatan membutuhkan anggaran operasional dari satuan kerja Bimbingan Masyarakat Islam (Bimas Islam) yang ada di Kantor Kementerian Agama Kabupaten selaku pengelola Biaya Operasional Pelaksana (BOP) tingkat Kabupaten.

Bimas Islam Kementerian Agama Kabupaten Pesawaran setiap bulannya mengeluarkan anggaran dari DIPA (Daftar Iaian Pelaksana Anggaran) untuk dana operasional kegiatan KUA se-Kecamatan Pesawaran. Dalam mekanisme pencairannya pengelola BOP KUA kecamatan membuat rencana kebutuhan operasionalnya yang diajukan kepada pengelola BOP di Bimas Islam Kementerian Agama Kabupaten Pesawaran, selanjutnya diserahkan ke bagian keuangan Kemenag Kabupaten untuk dilakukan pencairan

Pengelola BOP KUA Kabupaten akan melakukan monitoring dan supervisi terhadap laporan keuangan BOP KUA kecamatan per triwulan dan

Pengelola BOP KUA Provinsi akan melakukan monitoring dan supervisi terhadap laporan keuangan BOP KUA kecamatan per semester. Monitoring dan supervisi itu dilakukan untuk merekonsiliasi laporan BOP KUA kecamatan. Sesuai dengan keputusan Direktorat Jenderal Bimas Islam Kementerian Agama RI No. 340 tahun 2020 tentang Petunjuk teknis pengelolaan BOP KUA Kecamatan, bahwa pengelola BOP KUA Kecamatan wajib membuat rencana dan mengajukan dana serta melaporkannya (KUA, 2020). Saat ini pengelola BOP KUA Kabupaten mengalami kesulitan saat memberikan laporan kepada pengelola BOP KUA Provinsi pada saat melakukan monitoring penggunaan dana BOP KUA Kecamatan yang tidak memiliki keragaman dalam pelaporannya. Sementara itu, realitanya situasi dan kondisi yang ada bahwa semua KUA setiap Kecamatan di kabupaten Pesawaran, staff administrasi tidak memiliki kemampuan dalam membuat laporan yang terkomputerisasi. Sedangkan anggaran BOP KUA berasal dari APBN yang harus dipertanggung jawabkan penggunaannya dalam bentuk laporan penggunaan dana BOP KUA kepada pengelola BOP KUA di Kecamatan dan pengelola BOP KUA di Provinsi.

Adanya pengelolaan laporan BOP KUA yang masih tidak sesuai dengan standar pencatatan dan pelaporannya salah satunya disebabkan kerangkapan tugas pengelola BOP KUA kecamatan yang menjalankan tugas dan fungsinya sebagai penghulu kecamatan sehingga menyebabkan keterlambatan dalam pembuatan laporan BOP KUA yang akan berdampak terhadap pelayanan kepada masyarakat. Selain itu penumpukan bukti transaksi yang dicatat pada akhir periode merupakan salah satu penyebab hilangnya data yang berakibat transaksi tidak sesuai dengan akun yang ada di juknis dan Pengelola BOP Kabupaten kesulitan dalam

merekonsiliasi laporan yang ada dikarenakan waktu dan lokasi KUA kecamatan yang berjauhan. Selain itu belum adanya teknologi yang mendukung untuk pelaporan pengelolaan dana BOP KUA di Kabupaten Pesawaran yang bersumber dari dana DIPA Bimas Islam Kementerian Agama Pesawaran.

Sistem pengelolaan dan pelaporan BOP KUA secara digital memungkinkan adanya fleksibilitas dalam mengakses sistem pelaporan pengelolaan dana BOP dari setiap KUA Kecamatan, menghindari penyalahgunaan dari anggaran yang ada, mengurangi biaya perjalanan dinas. Dengan menggunakan teknologi aplikasi berbasis web diharapkan data kebutuhan dan penggunaan dana Operasional tersebut bisa lebih tertata, pengarsipan secara rapih dan transparan. Aplikasi pelaporan pengelolaan dana berbasis web sangat diperlukan, sehingga pelaporan yang dibuat nantinya dapat tepat waktu, tepat penggunaannya dan tepat akun. Selain itu aplikasi berbasis web yang terkomputerisasi dapat mengamankan data dan memberikan keseragaman pelaporan dan penggunaan dana BOP KUA sehingga dapat memudahkan dalam memonitoring penggunaannya.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang terdapat dalam penelitian ini, yaitu :

1. Bagaimana perancangan aplikasi yang dapat mengelola Biaya Operasional pada KUA Kecamatan Gedong Tataan ?
2. Bagaimana proses pengelolaan laporan Biaya Operasional pada KUA Kecamatan Gedong Tataan ?

1.3 Batasan Masalah

Batasan masalah yang terdapat dalam penelitian ini, yaitu :

1. Data yang digunakan didapat dari KUA Kecamatan Gedong Tataan yang selanjutnya akan dilaporkan kepada Kementerian Agama (Kemenag) Pesawaran dan kantor wilayah Kementerian Agama (Kemenag) provinsi.
2. Pembahasan hanya mencakup pengelolaan Biaya Operasional pada KUA Kecamatan Gedong Tataan.

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan yang terdapat dalam penelitian ini, yaitu :

1. Membuat aplikasi pengelolaan laporan dana Biaya Operasional KUA yang memudahkan bagi pengelola Biaya Operasional KUA Kabupaten Pesawaran dan pengelola Biaya Operasional KUA di Kecamatan Gedong Tataan.
2. Pengelola Biaya Operasional KUA Kecamatan Gedong Tataan dapat mencetak laporan yang dapat dilihat oleh pemberi pengelola Biaya Operasional KUA Kecamatan dan pengelola Biaya Operasional Kabupaten Pesawaran.

1.5 Manfaat Penelitian

Manfaat yang terdapat dalam penelitian ini, yaitu :

1. Dapat membantu pengelola Biaya Operasional Kabupaten Pesawaran dan Kecamatan Gedong Tataan dalam memberikan laporan penggunaan dana Biaya Operasional KUA yang akan memeriksa dan memvalidasi kesesuaian penggunaannya.
2. Dapat membantu pengelola Biaya Operasional KUA Kecamatan dalam melakukan usulan rencana kebutuhan anggaran Biaya Operasional KUA ke pengelola Biaya Operasional di Kabupaten.
3. Dapat membantu pengelola Biaya Operasional KUA Kabupaten untuk memvalidasi usulan rencana kebutuhannya untuk dilakukan pencairan.